

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR DAN JURNAL:

- Abdullah, Rozali, 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aji, A. Y., Laba, I. N. 2018. "Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara". *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 2 (2):27-42.
- Asshidiqqie, Jimly, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Basah, Sjahran, 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: Armico.
- Hadjon, P. M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, Zairin, 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Boedi, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- , 1997, *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan.
- HR Ridwan, 2010. *Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto, 1993 *.Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 1996.*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indri Hadisiswati, 2014. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *AHKAM*. 2 (1):127.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Perangin, Effendi, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prakosa Djoko dan Budiman Adi Purwanto, 2005. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Riawan W Tjandra, 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Santoso, Urip, 2015 *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simanjuntak, E. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiharto Hari dan Bagus Oktafian Abrianto, 2018. *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Arena Hukum, Vol. 11, No. 1 hlm. 160.
- Sutedi, Adrian, 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim IQ Edukasi, 2018. *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III,IV*. Jakarta: Grasindo.
- Triwulan, Titik T dan Ismu Gunadi Widodo, 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Utrecht, E, 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Penerbit Ichtiar.
- Wiyono, 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono R. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Edisi Ketiga. JaJakartaSinar Grafika.
- Muhammad Yasin dkk, 2017. *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: UI-CSGAR.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1751);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 91/G/2019/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 30/G/2021/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2019/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT

